

Tersedia online di <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/akuntabilitas><https://doi.org/10.35457/xxx>

AKUNTABILITAS



## PERBANDINGAN KREDIT MACET UMKM PADA BANK PERSERO DAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

Risna Kartika<sup>1</sup>, Retno Dyah Pekerti<sup>2</sup>, Elin Herlina<sup>3</sup>, Marlina Nur Lestari<sup>4</sup><sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Ekonomi Universitas Galuh<sup>1</sup>risnakartika@gmail.com

### Kata kunci:

**Kredit\_macet**  
**UMKM**  
**Bank\_Persero**  
**BPD**

### Keywords:

**NPL**  
**SMEs**  
**State\_owned\_bank;**  
**regional\_development\_banks**

Risna kartika, dkk. (2020).  
Perbandingan Kredit Macet UMKM  
pada Bank Persero dan Bank  
Pembangunan Daerah di Indonesia.  
Akuntabilitas: Jurnal Ilmiah Ilmu-  
Ilmu Ekonomi, 13(2), 50-60

### ABSTRAK

Salah satu kredit produktif yang gencar di promosikan di Indonesia ialah kredit untuk UMKM. Hal ini tak luput dari dukungan pemerintah, terlihat dari fasilitas kredit UMKM yang disalurkan dari pihak bank pemerintah baik Bank Persero maupun BPD, berdasarkan data dari tahun 2015 sampai dengan 2019 kredit UMKM yang disalurkan kedua pihak bank tumbuh baik meskipun dilihat secara umum Bank Persero menyalurkan kredit UMKM lebih besar dari BPD, tetapi hal tersebut tidak terlepas dari tingginya *Non Performing Loan* (NPL) yang lebih besar dari NPL minimum yang ditentukan oleh BI yakni 5%. Penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder yang digunakan ialah data rata-rata kredit untuk UMKM yang disalurkan perbulan oleh Bank Persero dan BPD di Indonesia yang dapat di peroleh dari SPI pada website OJK. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif serta menggunakan *independent t-test*, hal ini berdasarkan pada tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kredit macet atau NPL kredit UMKM pada Bank Persero dengan BPD di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata rasio NPL pada Bank Persero dan Bank BPD, dari rata-rata dapat disimpulkan bahwa Bank BPD memiliki rasio NPL lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Persero.

### ABSTRACT

One of the productive loans that are promoted in Indonesia is credit for MSMEs. This has not been spared from government support, as seen from the MSME credit facilities channeled from state banks, both State-Owned Banks and Regional Development Banks, based on data from 2015 to 2019, MSMEs loans channeled by both banks grew well even though it was seen in general that State-owned banks extended credit. MSMEs are bigger than BPDs, but this is inseparable from the high Non-Performing Loans (NPLs) which are more than the standard set by Bank Indonesia, namely 5%. This research use secondary data, in the form of average credit data for MSMEs that are distributed monthly by state-owned banks and Regional Development Banks in Indonesia which can be obtained from Indonesian Banking Statistics on the website of the Financial Services Authority (OJK). This study employed a descriptive method by using quantitative approach to collect the data. The data analysis technique use an independent t-test. This study aimed to find out a significant difference between MSMEs NPL at State-owned Banks and BPD in Indonesia. The result of this study shown that there is a significant difference in average MSMEs NPL ratio at State-owned Banks and Regional Development Banks, can be concluded that Regional Development Banks have higher MSMEs NPL ratios than State-owned Banks.

## PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga intermediasi yakni memfasilitasi antara pihak yang kelebihan dana atau biasa disebut dengan kreditur dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana atau biasa disebut dengan debitur (Firmansyah, 2014). Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, artinya tujuan dari perbankan ialah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di Indonesia sendiri secara umum bank dibagi menjadi 2 jenis, yang pertama yaitu Bank Umum dan yang kedua BPR (Firmansyah, 2014). Berdasarkan kepemilikannya jenis Bank dibagi kedalam berbagai jenis, yaitu Bank Milik Pemerintah Pusat, Daerah, Swasta Nasional, Swasta Asing dan Campuran. Bank Milik Pemerintah Pusat, Bank Milik Pemerintah Daerah, Bank Milik Swasta Nasional, Bank Milik Swasta Asing dan Bank Campuran. Bank milik pemerintah pusat atau Bank Persero yang memiliki 4 Bank yaitu BRI, BNI, BTN dan Bank Mandiri, sedangkan Bank Milik Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) sampai pada Desember 2018 ini tercatat 27 Bank Bank dengan ribuan kantor yang tersebar diseluruh Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Kegiatan perbankan yang paling banyak diminati diantaranya ialah kredit, sebagai lembaga intermediasi pihak bank berkewajiban mengalokasikan dana dari pihak atau masyarakat yang memiliki dana berlebih pada masyarakat atau pihak yang memerlukan dana. Tingginya ragam kebutuhan dana menyebabkan beragamnya jenis fasilitas kredit yang disediakan oleh pihak kreditur dalam hal ini perbankan. Kredit secara umum terbagi dalam dua jenis, yaitu kredit dengan sifat produktif yang diperuntukkan bagi perkembangan usaha dan kredit yang bersifat konsumtif (Aprilianawati et al., 2014). Kredit produktif biasanya diperuntukkan bagi keperluan mengembangkan usaha antara lain menambah kebutuhan modal, memperluas usaha atau memperbesar skala usaha. UMKM ialah salah satu jenis usaha yang menjadi pangsa pasar dari kredit produktif yang ditawarkan perbankan.

Hal ini berkaitan dengan jumlah UMKM di Indonesia yang terhitung cukup banyak (MAndolang et al., 2017).

Bila dilihat dari perannya bagi perekonomian di Indonesia, UMKM sangat perlu memperbesar skala usahanya secara kontinyu, terkait dengan hal itu pendanaan menjadi salah satu faktor kunci dan dengan mengajukan fasilitas kredit dapat menjadi salah satu solusinya. Terutama pada bank milik pemerintah baik pusat maupun daerah. Dukungan pemerintah pada UMKM di Indonesia terlihat dari tingginya fasilitas kredit yang disalurkan oleh bank milik pemerintah baik pusat maupun daerah untuk UMKM, hal ini diringkas dalam tabel 1.1. berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kredit Yang Disalurkan Bank Persero & Bank Pembangunan Daerah Beserta Kredit Macet UMKM di Indonesia**

Tahun	Bank Persero			Bank Pembangunan Daerah		
	Total kredit (Milyar Rupiah)	Kredit Macet (Milyar Rupiah)	NPL (%)	Total Kredit (Milyar Rupiah)	Kredit Macet (Milyar Rupiah)	NPL (%)
2015	383.166	13.437	3,51	51.858	5.851	11,28
2016	446.774	14.668	3,28	60.466	6.421	10,62
2017	495.186	17.460	3,53	70.366	6.636	9,43
2018	551.935	13.998	2,54	70.089	6.478	9,24
2019	612.748	16.836	2,75	75.264	5.930	7,88

**Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Otoritas Jasa Keuangan, 2019.**

Berdasarkan tabel 1.1 tercermin bahwa kredit yang dialokasikan pada UMKM oleh Bank Persero dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terbilang sangat besar dibandingkan dengan kredit yang dialokasikan oleh BPD, dengan rata-rata NPL untuk kredit yang disalurkan pada UMKM oleh Bank Persero ialah 3.12% sedangkan NPL untuk kredit yang disalurkan pada UMKM oleh Bank Pembangunan Daerah ialah sebesar 9.69%, jika dilihat dari standard yang ditetapkan Bank Indonesia NPL maksimum ialah sebesar 5%.

Beberapa penelitian terdahulu dilakukan dengan membandingkan kinerja keuangan menggunakan berbagai rasio keuangan Bank Umum Konvensional dengan berdasarkan prinsip syariah (Adityawarman, 2015; Arinta, 2016; Paramitha & Astuti, 2018; Wahyuni & Efriza, 2017), penelitian lain yang dilakukan untuk

mengetahui pengawasan kredit bermasalah pada salah satu BPD di Tulungagung, berdasarkan hasil penelitian pengawasan kredit sudah baik (Aprilianawati et al., 2014). Pada Bank Konvensional dan bank Syariah memiliki perbedaan yang signifikan jika dilihat menggunakan rasio LDR, CAR dan BOPO (Solikah et al., 2017), penelitian lain menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara NPL pada Bank BUMN dengan Bank Umum Swasta nasional (BUSN). Hal ini berkaitan dengan BUSN pada saat pemberian fasilitas kredit lebih ketat dan sulit dibandingkan dengan BUMN sehingga BUSN memiliki nilai NPL lebih rendah (Lestari, 2014). Penelitian lain mengkaji mengenai factor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit dan tingkat pengembalian kredit (Makandolu & Sogen, 2015; Nisa, 2016; Nurlestari & Mahfud, 2015). Aksesibilitas permodalan pada usaha mikro kecil di daerah Sumatera barat (Diana, 2019), penelitian selanjutnya membahas mengenai kinerja keuangan studi kasus pada BPR dan BPD (Wowiling & Mananeke, 2018), penelitian selanjutnya mengenai kredit bermasalah non UMKM dengan kredit bermasalah usaha pada sektor perbankan di Indonesia (Khotimah, 2014). **Perbedaannya**, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbandingan Non Performing Loan (NPL) kredit UMKM Bank persero dan Bank Pembangunan Daerah yang ada di Indonesia secara menyeluruh dengan menggunakan data rata-rata rasio NPL khusus untuk UMKM baik Bank Persero maupun Bank Pembangunan Daerah. Dengan begitu tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana perbandingan NPL Kredit UMKM pada Bank persero dan Bank Pembangunan Daerah. Hal ini menjadi masalah dari tahun ke tahun, sehingga penelitian ini perlu dilakukan. Maka penelitian ini diberi judul “Perbandingan Kredit Macet UMKM pada Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah”.

## METODE PENELITIAN

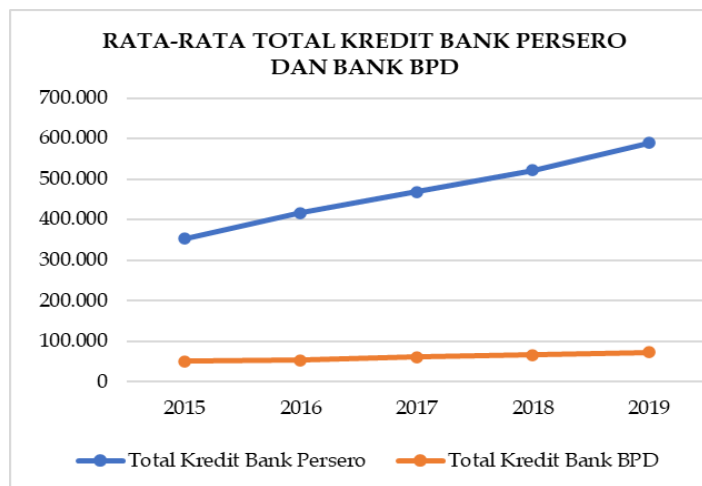
Metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif ialah metode yang digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan menganalisis hasil perbandingan NPL kredit UMKM Bank Persero dan BPD. Selanjutnya data sekunder yang digunakan bersumber dari buku, jurnal, artikel serta website terkait. Data kredit yang disalurkan dan data NPL kredit UMKM Bank persero dan BPD yang diperoleh dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) pada website OJK yaitu [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dari

tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Data akan diolah dengan menggunakan metode komparatif yaitu metode *independent t test*, sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji atau membandingkan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari dua sampel yang berhubungan, data yang digunakan diasumsikan berdistribusi normal, yang selanjutnya hasil olah data tersebut akan dianalisis secara deskriptif guna menginterpretasikan data yang digunakan dan diperlukan dalam penelitian dengan tidak dimaksudkan untuk menarik kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### Perkembangan Total Kredit UMKM pada Bank Persero

Perkembangan total kredit UMKM pada Bank Persero dan Bank pembanguana Daerah (BPD) di Indonesia yang terdapat dalam Gambar 1.1.

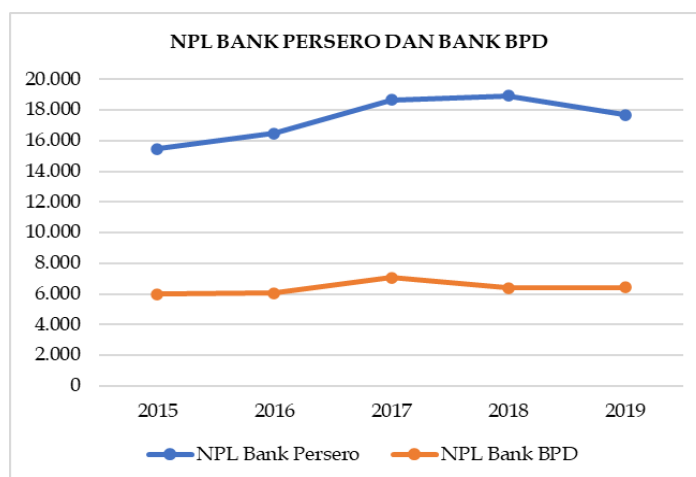


Gambar 1.1. Rata-rata Total Kredit Bank Persero dan BPD  
Sumber: SPI (2019)

Gambar 1.1 menyajikan rata-rata total kredit UMKM baik pada Bank Persero maupun Bank BPD yang cenderung meningkat setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Total Kredit Bank Persero di tahun 2019 ialah sebesar Rp. 588.946 Miliar, sedangkan total kredit BPD di tahun 2019 sebesar Rp. 73.014 Miliar.

## Perkembangan Kredit Macet Bank UMKM Pembangunan Daerah (BPD)

Perkembangan kredit macet UMKM pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia yang terdapat dalam Gambar 1.2.

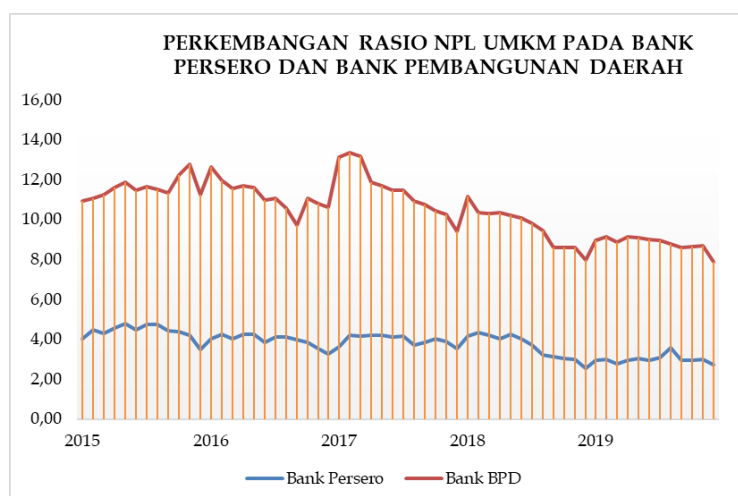


**Gambar 1.2. Rata-rata NPL Bank Persero dan BPD**  
Sumber: SPI (2019)

Gambar 1.1 menyajikan rata-rata total NPL Bank persero dan Bank BPD, NPL kredit UMKM pada Bank Persero cenderung naik tetapi turun di tahun 2019, rata-rata NPL Bank Persero tertinggi di tahun 2018 sebesar Rp. 18.931 Miliar, sedangkan untuk Bank BPD rata-rata NPL UMKM paling tinggi di tahun 2017 sebesar Rp. 7.059 Miliar.

## Perbandingan Rasio *Non Performing Loan* (NPL) UMKM pada Bank Persero dan Bank Pembanguna Daerah (BPD)

Perkembangan rasio NPL UMKM pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia yang terdapat dalam Gambar 1.3.



**Gambar 1.3 Perkembangan Rasio NPL Bank Persero dan Bank pembangunan Daerah**  
Sumber: SPI (2019)



Perkembangan rasio NPL kredit UMKM Bank Persero maupun Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 secara umum fluktuatif cenderung menurun, nilai rasio NPL tertinggi untuk Bank Persero terjadi pada bulan Mei tahun 2015 yaitu sebesar 4,78% sedangkan untuk Bank BPD rasio NPL tertinggi pada bulan Pebruari tahun 2017 sebesar 13,37%. Rasio NPL ini diperoleh dari perbandingan antara total nilai kredit macet atau NPL dengan total kredit (Khotimah, 2014; Makandolu & Sogen, 2015; Nisa, 2016; Nurlestari & Mahfud, 2015; Tani et al., 2019). Berdasarkan hasil uji statistik dengan *t test*, hasil yang diperoleh untuk data rasio NPL pada Bank Persero sebanyak 60 dan NPL pada Bank BPD sebanyak 60. Rata-rata rasio NPL untuk Bank persero adalah 3,80% sedangkan untuk Bank BPD ialah 10,56%. Standar deviasi rasio NPL pada Bank Persero ialah 0,58 sedangkan untuk Bank BPD sebesar 1,38 dengan standar error untuk Bank Perseo sebesar 0,07 sedangkan untuk BPD sebesar 0,17.

Sebelum melakukan uji *t* sampel bebas (*Independent Sample Test*), uji *F* (homogenitas/ uji *Levene's*) dilakukan terlebih dahulu. Berdasarkan hasil *Independent Sample Test*, diperoleh nilai signifikansi *F* sebesar  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok Bank Persero dengan Bank BPD memiliki varian yang sama sehingga Uji *t* (*Independent Sample Test*) menggunakan nilai "*Equal Variances not Assumed*", nilai signifikansi *t* pada *Independent Sample Test* dengan *Equal Variances not Assumed* ialah  $0,000 < 0,05$ , maka terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara rasio NPL kredit UMKM Bank Persero dengan BPD, dari rata-rata dapat disimpulkan bahwa Bank BPD memiliki rasio NPL lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Persero.

Jika dikaitkan dengan standar minimum rasio NPL Bank Indonesia yaitu 5%, rasio NPL Bank BPD melebihi standar tersebut. Rasio NPL yang cenderung tinggi ialah akibat dari kredit bermasalah yang cukup tinggi dibandingkan dengan total kredit yg disalurkan oleh bank terkait, dengan rasio NPL yang cenderung tinggi akan meningkatkan sisi beban atau biaya, diantaranya ialah biaya aktiva produktif yang kemudian akan mengganggu kinerja keuangan bank (Tani et al., 2019). NPL yang tinggi dapat diakibatkan berbagai faktor, diantaranya ialah makro maupun

manajemen internal bank, berkaitan dengan peran BPD dalam pembangunan maka timbulah komitmen untuk menaikkan penyaluran kredit produktif yang diperkirakan dapat meningkatkan risiko kredit BPD (Georgiou dalam Rokhim & Yanti, 2014). Risiko kredit yang dimaksud ialah tidak mempunya memenuhi kewajiban atau gagal bayar (Laurent dalam Rokhim & Yanti, 2014). Selain itu tingginya rasio NPL pada BPD di Indonesia ialah akibat dari jumlah atau akumulasi kredit bermasalah tahun-tahun sebelumnya (Satyagraha, 2018). UMKM merupakan salah satu sektor yang dibidik oleh perbankan dengan memperbesar porsi kredit yang disalurkan, meski demikian UMKM sendiri cukup rentan terhadap kenaikan NPL, hal ini dikarenakan diantaranya suku bunga UMKM tidak serendah pada segmen yang lebih besar (Khotimah, 2014).

Berbagai pendekatan yang dilakukan oleh perbankan untuk mencegah peningkatan NPL, antara lain manajemen resiko kredit yang lebih ketat, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat *prudential* serta memberikan pelatihan, pengembangan bahkan kompensasi untuk pihak pengelola kredit (Nurlestari & Mahfud, 2015). Selain itu upaya lain yang dilakukan guna menekan jumlah atau rasio NPL diantaranya dengan melakukan *mapping* kepada sebagian debitur seperti *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* (Satyagraha, 2018). Adanya evaluasi tersebut diharapkan dapat mengurangi bertambahnya jumlah NPL (Panggalih dalam Nurlestari & Mahfud, 2015). Upaya-upaya tersebut dilakukan agar terdapat kemauan dari debitur untuk menjadi lebih kooperatif dan diharapkan kondisi bank akan lebih baik (Azisri, 2018), hal ini berkaitan dengan NPL menjadi salah satu indikator kesehatan perbankan (Aliudin, 2019), karena pada kenyataanya BPD memiliki peran besar pada perkembangan UMKM dengan menyalurkan kredit produktif (Liswatin, 2018).

## KESIMPULAN

Salah satu kredit produktif yang gencar di promosikan di Indonesia ialah kredit untuk UMKM. Hal ini tak luput dari dukungan pemerintah, terlihat dari fasilitas kredit UMKM yang disalurkan dari pihak bank pemerintah baik Bank Persero maupun BPD dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tumbuh baik meskipun dilihat secara umum Bank Persero menyalurkan kredit UMKM lebih besar dari BPD, tetapi hal tersebut tidak terlepas dari



tingginya Non Performing Loan (NPL) yang lebih dari standard yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 5%. Berdasarkan uji *independent t-test* diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan rata-rata rasio NPL pada Bank Persero dan Bank BPD, dari rata-rata dapat disimpulkan bahwa Bank BPD memiliki rasio NPL lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Persero, meski demikian berbagai upaya telah dilaksanakan diantaranya evaluasi dengan menggunakan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*, dengan harapan dapat meminimalisir rasio NPL.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kemenristek Dikti yang telah mendanai penelitian ini dengan skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) serta Fakultas Ekonomi Universitas Galuh yang senantiasa memberi dukungan tak henti kepada penulis.

## Daftar Pustaka

### Jurnal:

- Adityawarman, F. M. (2015). PERBANKAN KONVENSIONAL DENGAN PERBANKAN SYARIAH. *Journal Of Accounting*, 4(4), 1-10.
- Aliudin, R. M. T. (2019). Kredit usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kinerja Penyaluran UMKM) Oleh Perbankan di Indonesia periode Tahun 2013-2018. *Jurnal Perspektif*, 17(1), 71-76. <https://doi.org/10.31294/jp.v17i1.5316>
- Aprilianawati, D., Zahroh, Z. A., & Nuzula, N. F. (2014). Analisis Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Meminimalisir Terjadinya Kredit Bermasalah ( Studi pada Bank Jatim Cabang Tulungagung Periode 2010-2013 ). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 10(1), 1-9.
- Arinta, Y. N. (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara Kasus pada Bank Syariah Mandiri dan Bank. *Muqtasid*, 7, 119-140.
- Azisri, Y. Z. (2018). Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kredit Macet bagi Nasabah Perbankan di Kampung Sidomulyo Kabupaten Marauke. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 345. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5689>
- Diana, R. (2019). Analisis Aksesibilitas Permodalan Usaha Mikro Kecil Pada Lembaga Keuangan Formal di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Dan*

- Firmansyah, I. (2014). Analisis Kredit Macet pada BPR di Indonesia : Pendekatan Sobel Test dan Bootstraping. *Jurnal Akuntasni*, 6(2), 114–122.
- Khotimah, N. (2014). Analisis Kredit Bermasalah Usaha Dan Non Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Perbankan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 19(3), 6026. <https://doi.org/10.35760/eb>.
- Lestari, D. (2014). Perbandingan Indikator Keuangan Antara Bank Umum Milik Negara dengan Bank Umum Swasta Nasional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(2), 92–105.
- Liswatin, Liswatin. (2018). Peranan BPD Sultra Cabang UNAAHA Dalam Pengembangan UKM sektor Jasa di Kabupaten Konawe. *Jurnal Akbrab Juara*. Volume 3 Nomor 3 Edisi Agustus 2018 (215-225).
- Makandolu, S. M., & Sogen, J. G. (2015). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PERTANIAN OLEH DEBITUR BANK NTT KANTOR CABANG UTAMA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ( ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING MICRO CREDIT REFUND OF MICRO , SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ( MSMEs ) IN AGRICULTURAL. *Jurnal Nukleus Peternakan*, 2(1), 33–41.
- MAndolang, A., Kumaat, R. J., & Niode, A. N. O. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kredti umkm di sulawesi utara periode 2012.1-2015.4. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(01), 34–43.
- Nisa, C. (2016). Analisis Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit Kepada UMKM Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM Oleh Perbankan. *DeReMa Jurnal Manajemen*, 11(2), 213–234. [https://doi.org/10.1007/978-3-642-17851-1\\_35](https://doi.org/10.1007/978-3-642-17851-1_35)
- Nurlestari, A., & Mahfud, M. K. (2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit UMKM (Studi pada Bank Umum yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013). *Diponegoro Journal of Management*, 4(4), 1–12.
- Paramitha, D. A., & Astuti, P. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah dan. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 3(2), 38–50.
- Rokhim, R., & Yanti, M. I. S. M. (2014). Risiko NPL Kredit Bank pembanguna Daerah sebagai Regional Champion. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 18(1), 120–129.

- Solikhah, H. M., Mardani, R. M., & Wahono, B. (2017). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia. *Warta Ekonomi*, 07(17), 20–32.
- Tani, V. M. A., Amtiran, P. Y., & Makatita, R. F. (2019). Pengaruh Penyaluran Kredit dan Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Perbankan (Studi Kasus Pada PT Bank NTT Kantor Pusat). *Journal Of Management*, 9(2), 133–150.
- Wahyuni, M., & Efriza, R. E. (2017). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional di Indonesia. 1, 66–74.
- Wowiling, F. E., & Mananeke, L. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Terhadap Pemberian Kredit Periode 2013-2016. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(1), 81–90.  
<https://doi.org/10.35794/emba.v6i1.18825>

#### Website:

- Mardiasmo, 2018. Kemetrian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/bpd-diharapkan-jadi-mitra-pemerintah-untuk-percepatan-pembangunan-daerah/> diunduh pada tanggal 25 Agustus 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan (2019). *Statistik Perbankan Indonesia*.  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Default.aspx> diunduh pada tanggal 5 April 2020.
- Satyagraha, Ferdian (2018). Direktur Keuangan Bank Jatim <https://bisnis.tempo.co/read/1053792/kenapa-kredit-macet-bpd-masih-tinggi>, diunduh pada tanggal 5 Juni 2020.